



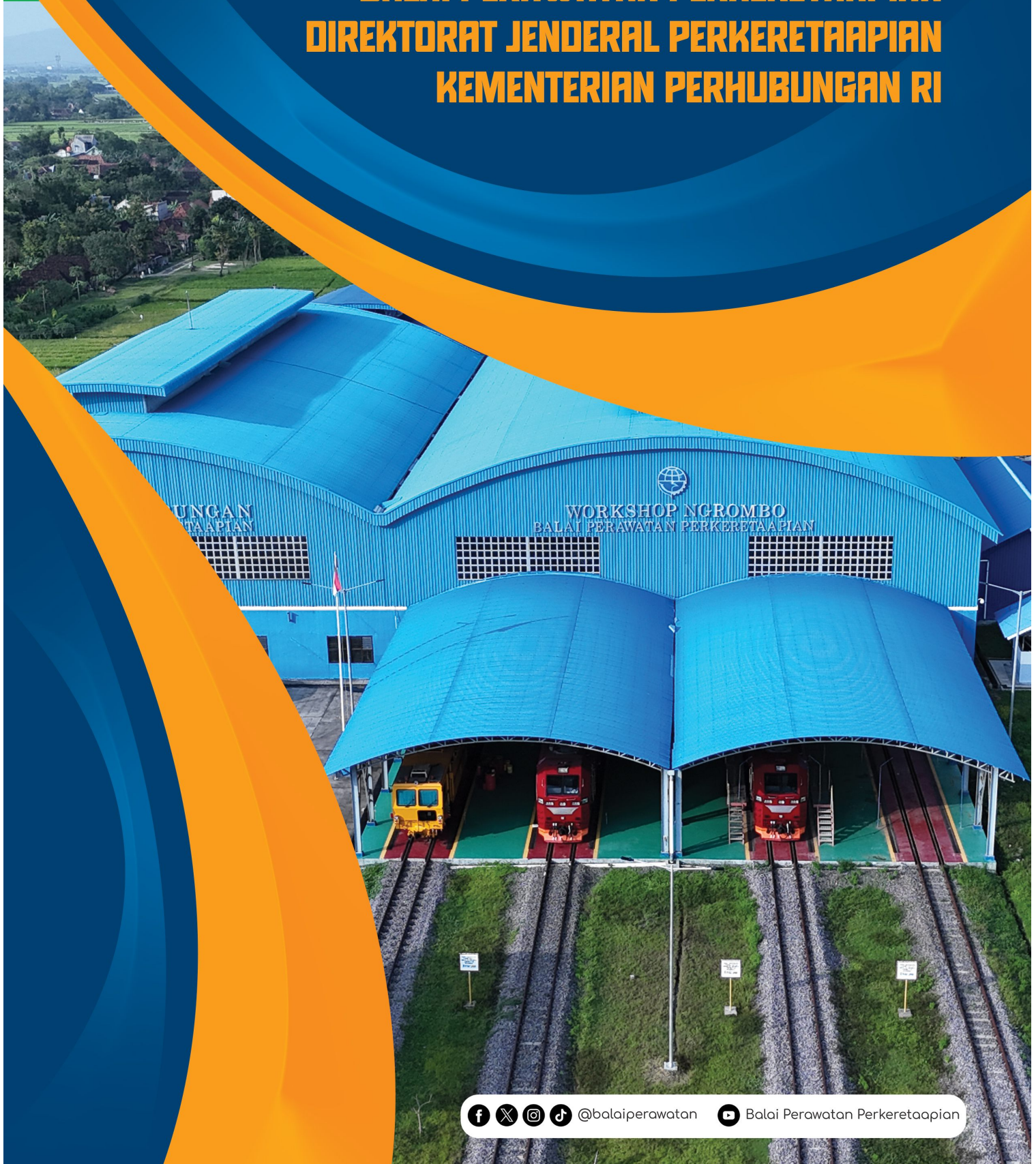
DJKA



djka.kemenuh.go.id/perawatanka

PERJANJIAN KINERJA 2026

**BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**



@balaiperawatan



Balai Perawatan Perkeretaapian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian tahun 2026 merupakan penetapan terhadap perubahan target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan tahun 2026 yang mengacu Rencana Strategis tahun 2025–2029 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perawatan Perkeretaapian. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta disusun dengan mempertimbangkan sumber daya diantaranya anggaran tahun 2026.

Perjanjian Kinerja selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Perawatan Perkeretaapian dalam rangka pencapaian sasaran dan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Grobogan, 14 Januari 2026

**KEPALA BALA PERAWATAN
PERKERETAAPIAN**



PRAYUDI

NIP. 197112081999031007

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
	1.4. Struktur Organisasi	3
	1.5. Sumber Daya Manusia	4
BAB II	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029	6
	2.1. Tujuan	6
	2.2. Sasaran	6
	2.3. Strategi	7
	2.4. Indikator Kinerja	7
	2.5. Program dan Kegiatan	10
BAB III	RENCANA KINERJA TAHUN 2026	11
	3.1. Pengukuran Indikator Kinerja	11
	3.2. Perjanjian Kinerja	12
	3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2026	13
BAB IV	: PENUTUP	14
LAMPIRAN A :	Indikator Kinerja Kegiatan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2026	
LAMPIRAN B :	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
LAMPIRAN C :	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diinstruksikan kepada para Menteri untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk merencanakan dan melaporkan capaian kinerja setiap tahun di lingkungan Kementerian Perhubungan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

Perjanjian Kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2026 disusun berdasarkan Revisi POK ke-1 Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2026 yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2025. Di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui sejumlah indikator kinerja yang relevan dengan tugas dan fungsi Balai Perawatan Perkeretaapian.

Target sasaran yang hendak dicapai, serta program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah untuk memberikan gambaran secara terperinci dan terukur mengenai sasaran yang ingin dicapai Balai Perawatan Perkeretaapian pada tahun 2026 yang dijabarkan dalam indikator kinerja kegiatan serta kegiatan pendukungnya. Perjanjian Kinerja juga memuat jumlah anggaran yang akan digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Penyusunan perjanjian kinerja ini bertujuan untuk menetapkan sasaran dan target yang hendak dicapai Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2026. Selanjutnya Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai pedoman dan tolok ukur keberhasilan atau kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian pada Tahun 2026.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Perawatan Perkeretaapian

Balai Perawatan Perkeretaapian merupakan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berperan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian dinyatakan bahwa Balai Perawatan Perkeretaapian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Sebagai unit kerja mandiri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Perawatan Perkeretaapian memiliki struktur organisasi yang berdiri sendiri serta tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing unsurnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014, Balai Perawatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Balai Perawatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan Perawatan berkala sarana perkeretaapian milik negara;
2. Pelaksanaan Perawatan berat sarana perkeretaapian milik negara;
3. Pelaksanaan pengendalian kualitas perawatan sarana perkeretaapian milik negara; dan
4. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, logistik, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas Balai Perawatan Perkeretaapian dapat melaksanakan fungsi perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian bukan milik negara.

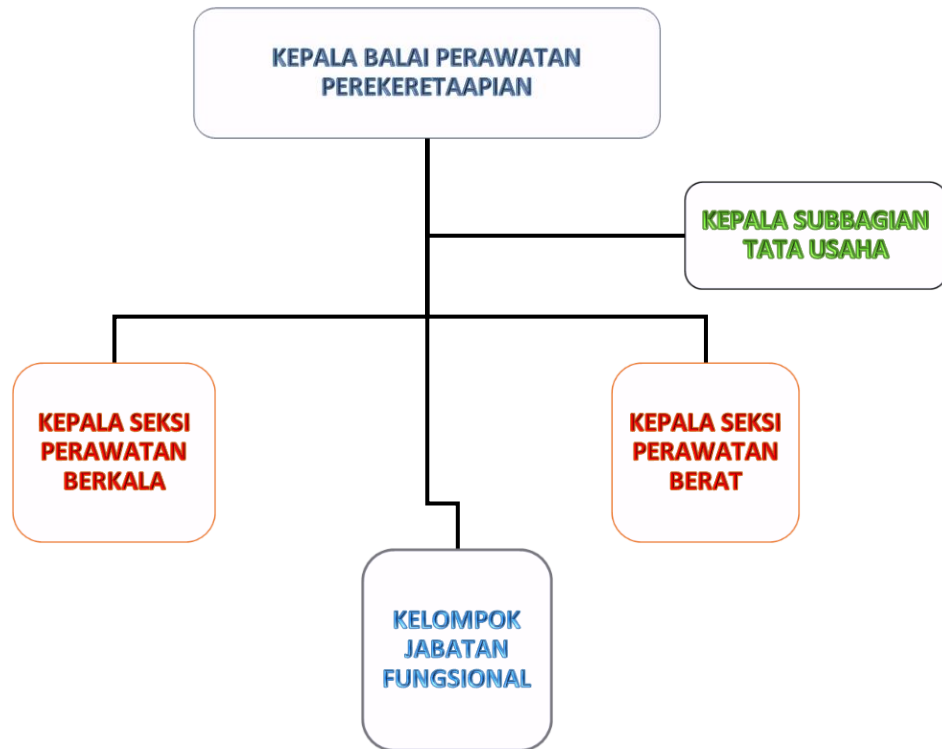
D. Struktur Organisasi Balai Perawatan Perkeretaapian

Struktur organisasi Balai Perawatan Perkeretaapian terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Perawatan Berkala;
3. Seksi Perawatan Berat; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Balai Perawatan Perkeretaapian dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN



Rincian tugas pokok masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;
2. Seksi Perawatan Berkala mempunyai tugas melakukan perawatan dan pengendalian kualitas perawatan berkala sarana perkeretaapian milik negara;
3. Seksi Perawatan Berat mempunyai tugas melakukan perawatan dan pengendalian kualitas perawatan berat sarana perkeretaapian milik negara;
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Tujuan

Berdasarkan visi yang akan diwujudkan dirumuskan tujuan yang hendak dicapai Balai Perawatan Perkeretaapian sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesiapan dan kehandalan sarana perkeretaapian;
2. Meningkatkan peran manajemen organisasi dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Balai Perawatan Perkeretaapian pada tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian;
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian;
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian.

C. Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang akan dicapai ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja yang akan menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian;
2. Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi;
3. Persentase Pemanfaatan Aset Perkeretaapian Milik Negara;
4. Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian;
5. Tingkat Penerepan Manajemen Resiko Balai Perawatan Perkeretaapian;
6. Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian;
7. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian;
8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian.

D. Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tahun 2026 Balai Perawatan Perkeretaapian melaksanakan Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen. Dalam kedua program tersebut termuat berbagai kegiatan yang akan mendukung terlaksananya tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Program yang akan dilaksanakan Balai Perawatan Perkeretaapian pada tahun 2026 dijabarkan dalam bentuk sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian. Sasaran ini dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan yaitu: IKK.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian, terdapat kegiatan Layanan Sarana Internal.
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian. Sasaran kegiatan ini dijabarkan dalam indikator kinerja kegiatan Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi. Guna mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut :

IKK.2 Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi, terdiri dari:

- Inhouse Consultant Swakelola Perawatan Milik Negara;
- Perawatan Sarana Pendukung (Excavator, Moveable Crane Tadano, RRV, Bridge Inspection Car);
- Perawatan Lori Inspeksi;
- Perawatan Forklift;
- Perawatan Sarana Perkeretaapian Gerbong;
- Perawatan Sarana Perkeretaapian Shunting Vehicle;
- Inhouse Consultant Swakelola Perawatan Peralatan Workshop;
- Inhouse Training Operator Pesawat Angkat Angkut dan Pesawat Tenaga Produksi;

- Uji Berkala Pesawat Angkat Angkut dan Pesawat Tenaga Produksi;
- Kalibrasi Alat Perawatan Sarana dan Alat Ukur;
- Pengadaan, Penjilidan, dan Operasional lainnya;
- Pengadaan Alat pelindung diri Personel;
- Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
- Pengadaan Peralatan Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- Perawatan Peralatan Khusus Multi Tie Tamper;
- Perawatan Sarana Perkeretaapian Lokomotif CC300;
- Pengadaan Suku Cadang Sarana Pendukung;
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Workshop Ngrombo;
- Perawatan Peralatan Workshop Mesin Produksi;
- Perawatan Fasilitas Pendukung Workshop;
- Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian;
- Studi Review Masterplan Balai Perawatan Perkeretaapian;
- Studi Kebutuhan dan Desain Pengembangan Depo KRL Depok.

IKK.3 Presentase Pemanfaatan Aset yang diKelola, terdiri dari:

- Administrasi Depo Depok – Jawa Barat;
- Administrasi Depo Solo Jebres;

3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian, ada beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut. Sasaran ini dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

IKK.4 Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian, terdapat kegiatan Penyusunan dokumen hasil Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

IKK.5 Tingkat Penerepan Manajemen Resiko Balai Perawatan Perkeretaapian, terdapat kegiatan Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Resiko.

IKK.6 Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan (Satker);
- Layanan Perkantoran;
- Layanan Manajemen Keuangan;
- Layanan Reformasi Kinerja;
- Layanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

IKK.7 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian, terdapat Pengelolaan, Monitoring, Evaluasi, Dan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian.

IKK.8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian, terdapat layanan Administrasi Ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kearsipan.

BAB III

RENCANA KINERJA

A. Pengukuran Indikator Kinerja (Kamus Indikator Kinerja)

Sasaran yang telah ditetapkan Balai Perawatan Perkeretaapian pada tahun 2026 sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian. Sasaran ini dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan yaitu: IKK.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian, terdapat kegiatan Layanan Sarana Internal.
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian. Sasaran kegiatan ini dijabarkan dalam indikator kinerja kegiatan Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi. Guna mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut :

IKK.2 Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi, terdiri dari:

- Inhouse Consultant Swakelola Perawatan Milik Negara;
- Perawatan Sarana Pendukung (Excavator, Moveable Crane Tadano, RRV, Bridge Inspection Car);
- Perawatan Lori Inspeksi;
- Perawatan Forklift;
- Perawatan Sarana Perkeretaapian Gerbong;
- Perawatan Sarana Perkeretaapian Shunting Vehicle;
- Inhouse Consultant Swakelola Perawatan Peralatan Workshop;
- Inhouse Training Operator Pesawat Angkat Angkut dan Pesawat Tenaga Produksi;
- Uji Berkala Pesawat Angkat Angkut dan Pesawat Tenaga Produksi;
- Kalibrasi Alat Perawatan Sarana dan Alat Ukur;
- Pengadaan, Penjilidan, dan Operasional lainnya;

- Pengadaan Alat pelindung diri Personel;
- Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
- Pengadaan Peralatan Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- Perawatan Peralatan Khusus Multi Tie Tamper;
- Perawatan Sarana Perkeretaapian Lokomotif CC300;
- Pengadaan Suku Cadang Sarana Pendukung;
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Workshop Ngrombo;
- Perawatan Peralatan Workshop Mesin Produksi;
- Perawatan Fasilitas Pendukung Workshop;
- Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian;
- Studi Review Masterplan Balai Perawatan Perkeretaapian;
- Studi Kebutuhan dan Desain Pengembangan Depo KRL Depok.

IKK.3 Presentase Pemanfaatan Aset yang diKelola, terdiri dari:

- Administrasi Depo Depok – Jawa Barat;
- Administrasi Depo Solo Jebres;

3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian, ada beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut. Sasaran ini dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

IKK.4 Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian, terdapat kegiatan Penyusunan dokumen hasil Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

IKK.5 Tingkat Penerepan Manajemen Resiko Balai Perawatan Perkeretaapian, terdapat kegiatan Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Resiko.

IKK.6 Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan (Satker);
- Layanan Perkantoran;
- Layanan Manajemen Keuangan;
- Layanan Reformasi Kinerja;

- Layanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

IKK.7 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian, terdapat Pengelolaan, Monitoring, Evaluasi, Dan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian.

IKK.8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian, terdapat layanan Administrasi Ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kearsipan.

B. Target Perjanjian Kinerja 2026

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja unit kerja maka perlu ditetapkan target yang harus dicapai untuk setiap indikator kinerja kegiatan. Target perjanjian kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian ditetapkan berdasarkan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sebesar 97,25.

- 2) Sasaran : Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a) Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi

Target persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 100% siap operasi;

- b) Presentase Pemanfaatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara

Target Persentase Pemanfaatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun 2026 ditetapkan sebesar 85%.

3) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan :

a) Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian

Target nilai AKIP Balai Perawatan tahun 2026 ditetapkan sebesar 81,40. Target nilai AKIP ditetapkan berdasarkan capaian nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian tahun 2026 sebesar 81,40, target pada nilai AKIP karena menyesuaikan penilaian tim evaluator agar realisasi mencapai target.

b) Tingkat Penerepan Manajemen Resiko Balai Perawatan Perkeretaapian ditetapkan nilai sebesar 15.

Target pada nilai MR karena menyesuaikan hasil penilaian agar realisasi mencapai target.

c) Persentase Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian

Target kualitas pelaksanaan anggaran ditetapkan berdasarkan target nilai kinerja anggaran tahun 2026 sebesar 84,83.

d) Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian

Target PNBP Balai Perawatan Perkeretaapian ditetapkan sebesar 100% dengan nilai Rp112.971.395.000,-. Nilai ini ditetapkan berdasarkan perkiraan penerimaan yang tercantum dalam DIPA Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2026.

d) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian

Target Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian tahun 2026 ditetapkan nilai sebesar 78,23.

Target berdasarkan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh tim sekretariat direktorat jenderal perkeretaapian.

Ringkasan sasaran, indikator kinerja, dan target dalam perjanjian kinerja balai perawatan perkeretaapian tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Target Perjanjian Kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian
Tahun 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1.	SK.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian	IKK.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	97,25
2.	SK.2 Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.2 Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi	%	100,00
		IKK.3 Presentase Pemanfaatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	%	85,00
3.	SK.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian	IKK.4 Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	81,40
		IKK.5 Tingkat Penerepan Manajemen Resiko Balai Perawatan Perkeretaapian	%	15,00
		IKK.6 Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	84,83
		IKK.7 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%	100,00
		IKK.8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	78,23

C. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran DIPA Balai Perawatan Perkeretaapian pada awal tahun 2026 sebesar Rp80.910.630.000,-.

Alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2026

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET PK 2026	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	SK.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian	IKK.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	97,25	- Layanan Sarana Internal	Rp 1.209.581.000
2	SK.2 Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.2 Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi	%	100,00	- <i>Inhouse Consultant</i> Swakelola Perawatan Milik Negara	Rp 100.000.000
					- Perawatan Sarana Pendukung (<i>Excavator, Moveable Crane Tadano, RRV, Bridge Inspection Car</i>)	Rp 1.751.821.000
					- Perawatan Lori Inspeksi	Rp 730.259.000
					- Perawatan <i>Forklift</i>	Rp 1.382.363.000
					- Perawatan Sarana Perkeretaapian Gerbong	Rp 2.536.802.000
					- Perawatan Sarana Perkeretaapian <i>Shunting Vehicle</i>	Rp 3.990.273.000

				- <i>Inhouse Consultant</i> Swakelola Perawatan Peralatan Workshop	Rp	100.000.000
				- Administrasi Kegiatan Swakelola Perawatan Sarana Milik Negara dan Peralatan Workshop	Rp	1.769.426.000
				- Pengadaan Peralatan Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian	Rp	2.966.850.000
				- Perawatan Peralatan Khusus <i>Multi Tie Tamper</i>	Rp	11.217.933.000
				- Perawatan Sarana Perkeretaapian <i>Lokomotif CC300</i>	Rp	10.512.205.000
				- Pengadaan Suku Cadang Sarana Pendukung	Rp	369.391.000
				- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Workshop Ngrombo	Rp	164.944.000
				- Perawatan Peralatan Workshop Mesin Produksi	Rp	718.623.000
				- Perawatan Fasilitas Pendukung Workshop	Rp	188.158.000
				- Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	Rp	1.112.864.000
				- Studi Review Masterplan Balai Perawatan Perkeretaapian	Rp	1.600.000.000
				- Studi Kebutuhan dan Desain Pengembangan Depo KRL Depok	Rp	1.800.000.000
		IKK.3 Presentase Pemanfaatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	%	85,00	- Administrasi Depo Solo Jebres	Rp 424.449.000
					- Administrasi Depo Depok - Jawa Barat	Rp 388.538.000

3	SK.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian	IKK.4 Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	81,40	- Penyusunan dokumen hasil Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Rp	48.246.000
		IKK.5 Tingkat Penerepan Manajemen Resiko Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	15,00	- Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Resiko	Rp	131.750.000
		IKK.6 Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	84,83	- Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan (Satker)	Rp	4.940.504.000
					- Layanan Perkantoran	Rp	28.172.271.000
					- Layanan Manajemen Keuangan	Rp	234.717.000
					- Layanan Reformasi Kinerja	Rp	1.047.401.000
					- Layanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp	823.650.000
		IKK.7 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%	100,00	- Pengelolaan, Monitoring, Evaluasi, Dan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	Rp	207.425.000
		IKK.8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	78,23	- Administrasi Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Kearsipan	Rp	270.186.000
TOTAL ANGGARAN						Rp	80.910.630.000

BAB IV

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian disusun dalam rangka penetapan rencana kerja pada tahun 2026. Perjanjian Kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian tahun 2026 menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian
2. Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi;
3. Presentase Pemanfaatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara;
4. Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian;
5. Tingkat Penerepan Manajemen Resiko Balai Perawatan Perkeretaapian;
6. Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian;
7. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian;
8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian.

Terkait perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja menyesuaikan hasil realisasi pada bulan Desember 2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2026. Oleh karena itu Perjanjian Kinerja Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah bagi unit kerja di Lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian dalam melaksanakan program kerja pada sisa waktu Tahun 2026, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1.	SK.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian	IKK.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	97,25
2.	SK.2 Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.2 Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi	%	100,00
		IKK.3 Presentase Pemanfaatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	%	85,00
3.	SK.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian	IKK.4 Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	81,40
		IKK.5 Tingkat Penerepan Manajemen Resiko Balai Perawatan Perkeretaapian	%	15,00
		IKK.6 Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	84,83
		IKK.7 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%	100,00
		IKK.8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	78,23

Grobogan, 14 Januari 2026

Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian



NIP 197112081999031007

PERJANJIAN KINERJA 2026
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET PK 2026	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	SK.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian	IKK.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	97,25	- Layanan Sarana Internal	Rp 1.209.581.000
2	SK.2 Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.2 Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi	%	100,00	- <i>Inhouse Consultant</i> Swakelola Perawatan Milik Negara	Rp 100.000.000
					- Perawatan Sarana Pendukung (<i>Excavator, Moveable Crane Tadano, RRV, Bridge Inspection Car</i>)	Rp 1.751.821.000
					- Perawatan Lori Inspeksi	Rp 730.259.000
					- Perawatan <i>Forklift</i>	Rp 1.382.363.000
					- Perawatan Sarana Perkeretaapian Gerbong	Rp 2.536.802.000
					- Perawatan Sarana Perkeretaapian <i>Shunting Vehicle</i>	Rp 3.990.273.000
					- <i>Inhouse Consultant</i> Swakelola Perawatan Peralatan Workshop	Rp 100.000.000
					- Administrasi Kegiatan Swakelola Perawatan Sarana Milik Negara dan Peralatan Workshop	Rp 1.769.426.000
					- Pengadaan Peralatan Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian	Rp 2.966.850.000
					- Perawatan Peralatan Khusus <i>Multi Tie Tamper</i>	Rp 11.217.933.000
					- Perawatan Sarana Perkeretaapian <i>Lokomotif CC300</i>	Rp 10.512.205.000
					- Pengadaan Suku Cadang Sarana Pendukung	Rp 369.391.000
					- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Workshop Ngrombo	Rp 164.944.000
					- Perawatan Peralatan Workshop Mesin Produksi	Rp 718.623.000
					- Perawatan Fasilitas Pendukung Workshop	Rp 188.158.000
					- Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	Rp 1.112.864.000
					- Studi Review Masterplan Balai Perawatan Perkeretaapian	Rp 1.600.000.000
					- Studi Kebutuhan dan Desain Pengembangan Depo KRL Depok	Rp 1.800.000.000
		IKK.3 Presentase Pemanfaatan Aset yang dikelola	%	85,00	- Administrasi Depo Solo Jebres	Rp 424.449.000
					- Administrasi Depo Depok - Jawa Barat	Rp 388.538.000

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET PK 2026	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
3	SK.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian	IKK.4 Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	81,40	- Penyusunan dokumen hasil Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Rp 48.246.000
		IKK.5 Tingkat Penerepan Manajemen Resiko Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	15,00	- Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Resiko	Rp 131.750.000
		IKK.6 Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	84,83	- Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan (Satker)	Rp 4.940.504.000
					- Layanan Perkantoran	Rp 28.172.271.000
					- Layanan Manajemen Keuangan	Rp 234.717.000
					- Layanan Reformasi Kinerja	Rp 1.047.401.000
					- Layanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 823.650.000
		IKK.7 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%	100,00	- Pengelolaan, Monitoring, Evaluasi, Dan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	Rp 207.425.000
		IKK.8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	78,23	- Administrasi Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Kearsipan	Rp 270.186.000
TOTAL ANGGARAN						Rp 80.910.630.000

Grobogan, Januari 2026

**KEPALA BALA PERAWATAN
PERKERETAAPIAN**

PRAYUDI
NIP. 197112081999031007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PRAYUDI**
Jabatan : Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Pihak Pertama,

PRAYUDI
NIP 197112081999031007

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	97,25
2	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara Siap Operasi	%	100,00
		Persentase Pemanfaatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	%	85,00
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	81,40
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	15,00
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	84,83
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%	100,00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	78,23

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS

- a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
- b. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian
- c. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

- a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
- b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

TOTAL

ANGGARAN EFEKTIF

Rp.	41.899.048.000
	2.966.850.000
Rp.	3.400.000.000
Rp.	35.532.198.000
Rp.	39.011.582.000
Rp.	38.187.932.000
Rp.	823.650.000
Rp.	80.910.630.000

Disetujui,

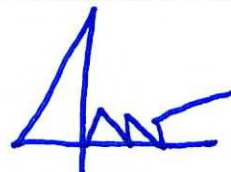
Jakarta, Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEPALA BALAI PERAWATAN
PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023



PRAYUDI
NIP 197112081999031007

**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2026**

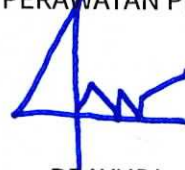
Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit Balai Perawatan Perkeretaapian, saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, Profil dan Peta Risiko, serta Rencana Penanganan Risiko.
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh Pengelola Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Rencana Penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.
4. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan monitoring dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin, termasuk melakukan komunikasi dan konsultasi yang diperlukan dengan lini kedua dan ketiga.

Grobogan, Januari 2026

Ditetapkan oleh

KEPALA BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN


PRAYUDI